

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Kinerja Keuangan Belanja Daerah provinsi NTT dilihat dari Varians Belanja Daerah selama tahun 2013-2015, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi belanja provinsi NTT sebesar 93,44%.
2. Kinerja Keuangan Belanja Daerah provinsi NTT dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah selama tahun 2013-2015, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu 16,10%.
3. Kinerja Keuangan Belanja Daerah provinsi NTT dilihat dari Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja tidak langsung, dan sebagian kecil dialokasikan untuk belanja langsung. Selama tahun 2013-2015 rata-rata belanja langsung sebesar 35,3% sedang belanja tidak langsung sebesar 64,7%. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi keserasian antar belanja.
4. Kinerja Keuangan Belanja Daerah provinsi NTT dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, realisasi anggaran belanja pemerintah provinsi NTT

tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi NTT telah melakukan efisiensi belanja.

Oleh karena itu, hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi NTT

Pemerintah provinsi NTT perlu mengalokasikan anggaran belanja langsung lebih besar daripada anggaran belanja tidak langsung supaya terjadi keserasian antar belanja.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2013-2015. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Belanja pemerintah provinsi NTT.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nurulafifah, Tyas. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010”. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Diunduh 2 Januari 2017.
- Sadjiarto, Arta. 2000. “Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah”. *Jurnal Akuntasi & Keuangan*. Universitas Kristen Petra.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLawmg58ufsc89hrsg/permendagri_13_2006.pdf. Diunduh 2 Maret 2017.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152411.pdf. Diunduh 2 Maret 2017.